



PERAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERCEPATAN KONVERGENSI DI JAWA TIMUR

Afrizal Rizky Barkah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: rizky.barkah@student.ub.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pemerataan pembangunan regional di Jawa Timur dan mengetahui dampak dari adanya kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan (kebijakan fiskal kontraktif) maupun sisi belanja (kebijakan fiskal ekspansif) terhadap percepatan konvergensi yang terjadi di Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif relasional melalui model persamaan konvergensi absolut dan kondisional Barro Sala (1995). Data yang digunakan adalah data panel 38 kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2015-2019. Data tersebut bersumber dari BPS Nasional, BPS Jawa Timur, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terjadi konvergensi di Jawa Timur dengan kecepatan konvergensi sebesar 5,7% per tahun; 2) kebijakan fiskal kontraktif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap percepatan konvergensi sehingga kondisi konvergensi tidak memiliki perbedaan antara kondisi eksisting dengan adanya perubahan kebijakan kontraktif; 3) kebijakan fiskal ekspansif memiliki pengaruh positif terhadap percepatan konvergensi di Jawa Timur sehingga estimasi lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya keseimbangan pemerataan pendapatan di Jawa Timur menjadi lebih cepat.

Kata Kunci: Konvergensi,, Kebijakan Fiskal, Pendapatan dan Belanja Pemerintah

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju perubahan yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tolak ukur keberhasilan pembangunan yang paling sering digunakan adalah dengan melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh suatu negara/daerah. Selain itu pembangunan juga dituntut untuk dapat menjaga tingkat ketimpangan yang terjadi terkait dengan pendapatan antar penduduk maupun antar daerah. Dalam konsep sederhana, ukuran dari tingkat kesejahteraan sebagai hasil dari pembangunan ekonomi merupakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun realita yang terjadi tidak selalu menunjukkan hasil yang diharapkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan adanya tingkat pertumbuhan yang merata antar daerah sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gasparini & Lustig (2011) dapat ditunjukkan bahwa negara-negara yang berada di Amerika Latin memiliki pendapatan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Namun hal tersebut tidak serta merta menghasilkan sebuah pemerataan kesejahteraan yang baik di masing masing daerah. Sehingga muncul isu ketimpangan yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan juga ketimpangan pendapatan antar wilayah sehingga terjadi ketidakstabilan perekonomian dan ketidakstabilan sosiopolitik antar wilayah.

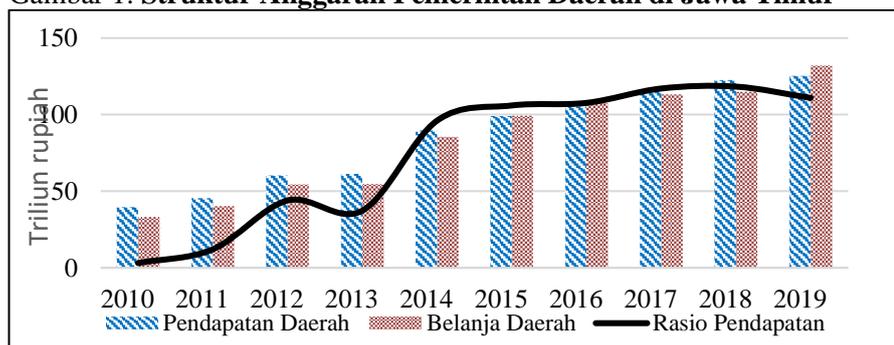
Ketimpangan antar wilayah ini muncul dikarenakan adanya perbedaan dari karakteristik sumber daya yang dimiliki dari masing masing daerah atau biasa dikenal dengan istilah endowment factor. Perbedaan dalam endowment factor meliputi adanya perbedaan dalam hal modal ekonomi dan modal sosial seperti sumber daya alam, kondisi ekonomi, kondisi sosial, adat istiadat, budaya, jumlah penduduk, kualitas SDM, letak

geografis, ketersediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian, serta kondisi kelembagaan dari pemerintahan daerah maupun masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Implikasi yang terjadi dari adanya perbedaan tersebut adalah kemampuan daerah untuk tumbuh menjadi tidak sama sehingga akan terdapat daerah yang dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang lainnya dan ada pula daerah yang tumbuh dengan lambat. Selain itu, ketimpangan regional juga dapat terjadi karena adanya pembangunan yang tidak merata, hanya berpusat pada satu atau beberapa daerah saja. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan polarisasi pembangunan dan kesenjangan ekonomi antar daerah yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan yang timpang antar wilayah satu dengan lainnya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memiliki kinerja cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lainnya maupun dengan tingkat nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dipublikasikan dalam laman Badan Pusat Statistik Nasional. Dalam data tersebut ditunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Indonesia dari tahun 2009 hingga 2019. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Indonesia memiliki tren yang menurun dari tahun 2012-2019. Walaupun mengalami tren yang negatif, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan di Jawa Timur memiliki kinerja dan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Namun demikian, kondisi ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur dan Indonesia dalam kurun waktu 2010 s.d. 2019. Indeks yang dimiliki Jawa Timur cukup tinggi dilihat dari rata-rata indeks yang dimiliki sebesar 0,9 sedangkan untuk Indeks Williamson Nasional berada di kisaran 0,7. Dari perbandingan ini dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari pergerakan nilai indeks selama kurun waktu 10 tahun ini, ternyata Indeks Williamson Jawa Timur memiliki kecenderungan untuk memiliki tren positif atau naik sedangkan di lain sisi Indeks Williamson Indonesia memiliki tren yang negatif atau menurun. Dapat diartikan bahwa ketimpangan yang terjadi di Jawa Timur semakin lebar sedangkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia mulai berkurang.

Gambar 1. Struktur Anggaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2010-2019), diolah

Pada gambar 3 terlihat bahwa struktur anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2010 s.d. 2019 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan dan belanja keduanya mengalami kenaikan yang sejalan dikarenakan sistem anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah mengacu pada sistem anggaran balanced budget. Hal ini berarti bahwa rasio antara pendapatan dan belanja diharapkan agar selalu seimbang setiap tahunnya. Selain itu, gambar 1.5 juga menampilkan rasio antara anggaran pendapatan dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto. Dapat dilihat bahwa rasio

anggaran pendapatan pemerintah memiliki tren positif selama kurun waktu 2010 hingga 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin besar.

Mengacu kondisi yang dipaparkan sebelumnya bahwa diketahui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata di Indonesia. Namun demikian, kondisi makroekonomi Jawa Timur yang relatif baik tidak diiringi dengan perbaikan ketimpangan regional. Padahal pada sisi lainnya, peran pemerintah khususnya dalam segi anggaran semakin meningkat dalam perekonomian Jawa Timur. Berdasarkan fakta tersebut, fokus penelitian ini adalah membuktikan secara empiris apakah peran pemerintah mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Dalam hal ini, penggunaan model konvergensi Barro sebagai alat analisis cukup beralasan. Model tersebut berusaha melihat kondisi pemerataan pembangunan kedepan tanpa adanya perubahan kebijakan. Secara spesifik, penelitian ini memodifikasi model konvergensi Barro dengan memperhatikan peran pemerintah melalui kebijakan fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Berdasarkan deskripsi diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah seberapa besar tingkat konvergensi yang terjadi serta dampak dari kebijakan fiskal pemerintah daerah terhadap percepatan konvergensi yang terjadi di wilayah Jawa timur.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori ekonomi Neo klasik menjelaskan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja dan aliran modal. Model ini pertama kali diinisiasi oleh Robert Solow pada tahun 1956 dan 1957 dimana dijelaskan dalam modelnya yaitu teori pertumbuhan neoklasik dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga sumber pertumbuhan output yakni modal, tenaga kerja, serta teknologi. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah fungsi produksi antar wilayah memiliki kesamaan, sehingga aliran tenaga kerja akan bergerak dari daerah yang memiliki tingkat upah rendah menuju ke daerah yang memiliki upah tinggi dan aliran modal bergerak dengan arah yang berlawanan. Perpindahan ini akan berlangsung dalam jangka panjang hingga tercapai kondisi keseimbangan di masing-masing daerah.

Secara umum teori neoklasik yang dijabarkan oleh Solow, pada jangka panjang akan berimplikasi terhadap terjadinya konvergensi. Konvergensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses penurunan tingkat kesenjangan pendapatan perkapita antar suatu daerah menuju suatu titik kesimbangan. Dengan kata lain dapat juga diartikan sebagai proses dimana daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah mengalami percepatan pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi sehingga tercipta sebuah keseimbangan tingkat pendapatan per kapita. Pengertian konvergensi secara statistik adalah proses penurunan dispersi dari sekelompok data menuju satu nilai tertentu dalam sebuah periode waktu tertentu (Barro & Sala-I-Martin, 1992). Selain itu, menurut Barro & Sala konvergensi diartikan sebagai adanya tendensi wilayah-wilayah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya dengan wilayah kaya atau biasa disebut dengan istilah catching up effect. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara maju akan mengalami kondisi steady state, yaitu pada saat daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi sudah dapat meningkat lagi karena adanya tambahan investasi tidak lagi menambahkan pendapatannya.

Kondisi konvergensi dimaksud disebabkan karena seluruh biaya produksi sudah dapat ditanggung oleh investasi yang aktual, sehingga tambahan tabungan (saving) di daerah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tambahan investasi. Di daerah dengan kondisi steady state, tambahan modal tidak lagi bermanfaat karena akan menyebabkan rasio modal per tenaga kerja menjadi semakin besar. Pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengembalian atas modal. Sementara itu, daerah miskin/berkembang akan memiliki tingkat

investasi yang nilainya berada jauh di bawah biaya produksi, sehingga penambahan tabungan dapat menjadi tambahan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara tersebut ke titik yang lebih tinggi.

Melalui hal tersebut, studi ini mencoba untuk menghubungkan antara kondisi pemerataan pembangunan ekonomi dengan peran yang dimiliki oleh sektor publik. Dalam konsep pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam melakukan pengembangan/pembangunan wilayah adalah dengan menggunakan strategi unbalanced growth. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Hirschman di tahun 1958 dalam bukunya *strategy of economic development* yang menyatakan bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang dan bertumbuh bila terjadi keseimbangan. Menurutnya, pembangunan adalah sebuah rantai ketidakseimbangan yang perlu untuk dipertahankan karena keuntungan dan kerugian yang terjadi akibat ketidakseimbangan merupakan sebuah tanda ekonomi yang kompetitif (Hirschman, 1958).

Pemerintah selaku pemilik kebijakan diharapkan dapat menjaga dan mengelola ketidakseimbangan yang terjadi sehingga memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi suatu wilayah. Namun pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya (anggaran) dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut. Anggaran pemerintah tidak mungkin diinvestasikan pada setiap sektor secara merata, tetapi harus dijalankan sesuai dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keunggulan sektor tertentu (*leading sector*) yang dapat memberikan stimulus terhadap perkembangan sektor lainnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi regional di suatu wilayah. Strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui struktur anggaran diupayakan dapat memberikan solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi suatu wilayah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan data panel seluruh daerah Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten serta 9 Kotamadya. Dengan mengadopsi model Barro & Sala-i-Martin (1992) terkait konvergensi yang cukup relevan digunakan dalam rangka mengestimasi tingkat konvergensi yang terjadi melalui model konvergensi absolut, serta untuk mengetahui dampak dari adanya perubahan kebijakan fiskal melalui model konvergensi kondisional.

Konvergensi absolut

Model konvergensi absolut selain digunakan untuk mengukur tingkat konvergensi yang terjadi, juga dapat disimulasikan sebagai metode untuk menganalisis kondisi konvergensi di wilayah Jawa Timur tanpa adanya perubahan kebijakan karena hanya memasukkan variabel pendapatan per kapita awal dari masing-masing kabupaten/kota. Model persamaan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Simulasi I

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \beta_0 + \alpha_0 \ln(y_{i,t_0}) + \varepsilon_1 \quad (i)$$

Konvergensi kondisional

Sedangkan pada model konvergensi absolut selain digunakan untuk mengukur tingkat konvergensi yang terjadi, juga dapat disimulasikan sebagai metode untuk menganalisis kondisi konvergensi di wilayah Jawa Timur tanpa adanya perubahan kebijakan karena hanya memasukkan variabel pendapatan per kapita awal dari masing-masing kabupaten/kota. Model persamaan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Simulasi II

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \beta_0 + \alpha_1 \ln(y_{i,t_0}) + \alpha_2 \ln PAD_{it} + \alpha_3 \ln Daper_{it} + \varepsilon_i \quad (ii)$$

Simulasi III

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \beta_0 + \alpha_4 \ln(y_{i,t_0}) + \alpha_5 \ln BP_{it} + \alpha_6 \ln BB_{it} + \alpha_7 \ln BM_{it} + \varepsilon_i \quad (iii)$$

Variabel dependen merupakan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, $\ln(y_{i,t_0})$ adalah pendapatan per kapita awal kabupaten/kota, ε_i merupakan error, sedangkan α_0 merupakan tingkat konvergensi. Nilai koefisien α_0 apabila bernilai positif berarti divergensi, namun apabila bernilai negatif maka terjadi konvergensi.

Simulasi II merupakan metode yang digunakan untuk mensimulasi kebijakan fiskal dari sisi pendapatan (kontraktif), sedangkan model persamaan simulasi II adalah simulasi peran kebijakan fiskal dari sisi belanja (ekspansif) terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Variabel PAD merupakan Pendapatan asli daerah, yaitu rasio dari pendapatan asli daerah terhadap PDRB, Daper merupakan dana perimbangan, yaitu rasio antara dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah terhadap PDRB. BP merupakan belanja pegawai yaitu rasio pengeluaran belanja pegawai terhadap PDRB, BB merupakan belanja barang dan jasa yaitu rasio pengeluaran belanja barang dan jasa dengan PDRB, dan BM merupakan belanja modal yaitu rasio pengeluaran belanja modal terhadap PDRB.

Nilai koefisien konvergensi dari masing-masing variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel $\ln(y_{i,t_0})$ adalah jika memiliki nilai dengan arah yang sama (negatif) berarti bahwa variabel tersebut dapat mempercepat konvergensi sedangkan nilai koefisien yang positif berarti bahwa variabel tersebut diduga dapat memperlambat konvergensi.

Selanjutnya, dapat diketahui pula kecepatan konvergensi (speed of convergence) dengan menggunakan formula sebagai berikut $S = (\ln(\beta + 1))$. S adalah koefisien kecepatan konvergensi, β adalah koefisien variabel dan β adalah nilai koefisien konvergensi. Ketika kecepatan konvergensi telah mampu di estimasi maka tahapan berikutnya adalah mengestimasi lama waktu half time convergence. Hal ini menjelaskan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadi keseimbangan pendapatan per kapita antar wilayah observasi. Rumus yang digunakan untuk mengukur half time convergence adalah dengan melalui persamaan: $H = \ln 2 / (\ln(\beta + 1))$. H adalah half time convergence dan $\beta = \alpha_0$ adalah koefisien konvergensi.

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan model konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Konvergensi absolut adalah konvergensi yang berjalan tanpa adanya pengaruh dari faktor kebijakan dan faktor pertumbuhan sedangkan konvergensi kondisional adalah konvergensi yang terjadi akibat adanya pengaruh dari perubahan kebijakan maupun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan dengan menggunakan model fixed effect, simulasi pertama yang berusaha untuk mengestimasi hubungan pendapatan per kapita awal kabupaten/kota dengan pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki koefisien yang bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa terjadi konvergensi di Jawa Timur dimana kabupaten/kota yang memiliki nilai pendapatan per kapita awal yang rendah memiliki kemampuan untuk bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang sudah memiliki tingkat pendapatan per kapita awal yang tinggi.

Simulasi kedua dan ketiga juga menggunakan model fixed effect sebagai model yang terbaik atas dasar uji Chow dan uji Hausman. Model simulasi ini berusaha melihat hubungan dari kebijakan fiskal terhadap tingkat konvergensi dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita di kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil yang didapatkan dari simulasi II menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pendapatan perkapita awal kabupaten/kota terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Hasil yang sama juga diperoleh dalam simulasi III yang menunjukkan hubungan yang negatif antara pendapatan per kapita awal dengan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita.

Hasil Uji Simulasi I

Berdasarkan hipotesis awal yang terdapat dalam teori konvergensi absolut, dapat disimpulkan bahwa konvergensi absolut terjadi apabila terdapat hubungan negatif antara tingkat pendapatan per kapita awal periode suatu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ($\beta_1 < 0$).

Tabel 1. Hasil Estimasi Konvergensi Tanpa Adanya Perubahan Kebijakan

Variable	Coefficient	Prob.
Konstanta	0.9983082*	0,0000
PDRB per Kapita Awal (lnY ₀)	- 0.0556357*	0,0000
Adjusted R-squared	0.1464	
Prob (F-statistic)	0.0003	
β_1	- 0.0556357	
Speed of Convergence	0,0572432	
Half-Time	12.4586763	

Sumber: Pengolahan data menggunakan STATA 14.0

Keterangan : * = signifikan pada alpha (α) 5%

Nilai koefisien yang negatif dari variabel pendapatan per kapita awal memiliki arti bahwa terjadi konvergensi absolut di Jawa Timur pada periode 2015-2019. Kecepatan konvergensi ditunjukkan dengan nilai speed of convergence adalah sebesar 5,7 persen per tahun. Sedangkan separuh waktu yang dibutuhkan daerah dengan tingkat pendapatan perkapita rendah untuk mengejar ketertinggalan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita tinggi (Half Time) membutuhkan waktu sekitar 12,45 tahun.

Hasil Uji Simulasi II

Konvergensi kondisional adalah perhitungan model konvergensi yang mempertimbangkan karakteristik-karakteristik tertentu yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah. Hipotesis konvergensi kondisional/bersyarat mempunyai asumsi bahwa terdapat korelasi negatif tingkat pendapatan perkapita periode awal dan tingkat pertumbuhan yaitu jika variabel pendapatan perkapita bernilai negatif, ($\beta_1 < 0$), teori ini kemudian dapat diakomodasikan pada observasi empiris tentang konvergensi jika ada heterogenitas perekonomian antar wilayah observasi.

Tabel 2. Hasil Estimasi Konvergensi dengan Kebijakan Fiskal Kontraktif

Variable	Coefficient	Prob
Konstanta	1.013843	0.000*
PDRB Per Kapita Awal (LnY ₀)	- 0.0591151	0.000*
Rasio PAD / PDRB* (Ln)	0.0163926	0.056**
Rasio DAPER / PDRB* (Ln)	- 0.039352	0.008*
Adjusted R-squared	0.0872	
Prob (F-statistic)	0.0000	
β_1	- 0.0591151	
Speed of Convergence	0.060934464	
Half-Time	11.37528978	

Sumber: Pengolahan data menggunakan STATA 14.0

Keterangan : *), **) = signifikan pada alpha (α) = 5%, 10%

Menurut (Amri et al., 2019) pendapatan asli daerah memiliki hubungan kausalitas dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini berarti bahwa apabila dalam suatu kondisi pendapatan asli daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hubungan tersebut dapat terjadi karena pendapatan asli daerah yang besar menunjukkan semakin tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan di daerah. Kemampuan pendanaan yang lebih besar berarti bahwa pemerintah dapat melakukan belanja yang lebih besar, sehingga dapat memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi. Begitu juga dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang diukur menggunakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah yang berasal dari adanya pajak atau retribusi yang dipungut atas suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu daerah. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah akan mendorong aktivitas perekonomian dapat berjalan lebih aktif kemudian pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain PAD, komponen kebijakan fiskal dari sisi pendapatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan adalah dana perimbangan. Dana perimbangan diduga memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati dan Waluyo pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa alokasi dana perimbangan tidak dapat memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi. Dana alokasi umum, komponen terbesar dalam dana perimbangan, merupakan dana (blockgrant) yang diberikan dengan tujuan sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat untuk menjaga ketimpangan fiskal antar daerah, pada kenyataannya tidak dapat memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pengaruh negatif dana perimbangan terhadap pertumbuhan juga dapat disebabkan karena terdapat komponen dana perimbangan yang hanya menguntungkan beberapa daerah saja. Komponen tersebut adalah dana bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas hasil sumber daya yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, daerah yang memiliki endowment factor lebih banyak akan menerima dana yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya ekonomi. Sehingga, daerah dengan tingkat endowment factor yang rendah akan mendapatkan lebih sedikit dana bagi hasil yang akan menyebabkan terjadinya ketimpangan horizontal antar daerah.

Pengaruh negatif dana perimbangan terhadap pertumbuhan juga dapat disebabkan karena terdapat komponen dana perimbangan yang hanya menguntungkan beberapa daerah saja. Komponen tersebut adalah dana bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas hasil sumber daya yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, daerah yang memiliki endowment factor lebih banyak akan menerima dana yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya ekonomi. Sehingga, daerah dengan tingkat endowment factor yang rendah akan mendapatkan lebih sedikit dana bagi hasil yang akan menyebabkan terjadinya ketimpangan horizontal antar daerah.

Selain itu, alasan lainnya yang diduga menyebabkan adanya pengaruh negatif dana perimbangan terhadap pertumbuhan adalah karena dana perimbangan merupakan salah satu tolak ukur seberapa besar tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar rasio dana perimbangan terhadap total anggaran pendapatan suatu pemerintah daerah, akan semakin rendah tingkat kemandirian suatu wilayah. Pada gambar 4.8 terlihat bahwa

mayoritas daerah kabupaten/kota di Jawa Timur masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Lebih dari 75% wilayah di Jawa Timur masih bergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah masih belum mampu memaksimalkan sumber ekonomi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi (Waluyo, 2007).

Hasil Uji Simulasi III

Pada model simulasi III, peneliti mencoba memasukkan tiga variabel bebas yang dapat digunakan sebagai proxy adanya kebijakan fiskal ekspansif melalui anggaran belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang & jasa, serta belanja modal.

Tabel 3. Hasil Estimasi Konvergensi dengan Kebijakan Fiskal Ekspansif

Variable	Coefficient	Prob
Konstanta	2.293323	0.000*
PDRB Per Kapita Awal (LnYo)	- 0.1299401	0.000*
Rasio BP / PDRB (Ln)	- 0.0213229	0.009*
Rasio BBJ / PDRB (Ln)	0.0278287	0.000*
Rasio BBM / PDRB (Ln)	- 0.0035615	0.476
<i>Adjusted R-squared</i>	0.0005	
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.0000	
β_1	- 0.1299401	
<i>Speed of Convergence</i>	0.139193219	
<i>Half-Time</i>	4.979748187	

Sumber: Pengolahan data menggunakan STATA 14.0

Keterangan : * = signifikan pada alpha (α) 5%

Belanja pegawai memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Hubungan negatif ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Heng & Hong, 2012) yang mencoba mengestimasi hubungan yang terjadi antara belanja produktif dan non produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Heng, belanja pegawai dapat dikategorikan sebagai belanja non produktif yang tidak dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh kajian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2017). Penelitian yang dilakukan mencoba menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dengan menggunakan variabel belanja pemerintah dan didapatkan hubungan negatif antara belanja pemerintah terhadap pertumbuhan. Belanja pegawai yang mayoritas dialokasikan untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan merupakan pengeluaran yang tidak memiliki nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Belanja barang dan jasa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Semakin tinggi alokasi belanja barang dan jasa akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Belanja Barang dan Jasa dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Belanja barang dan jasa dapat meningkatkan nilai konsumsi pemerintah serta dapat menstimulus sektor swasta untuk meningkatkan output dan produktivitas (Li & Sarte, 2004). Peningkatan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan PDRB dari sisi permintaan melalui pengeluaran pemerintah. Selain itu permintaan barang dan jasa pemerintah akan direspon dengan peningkatan output oleh sektor swasta. Dengan adanya permintaan dan penawaran yang terjadi antara sektor publik dan swasta akan tercipta aktivitas ekonomi yang menstimulus sektor swasta untuk melakukan peningkatan

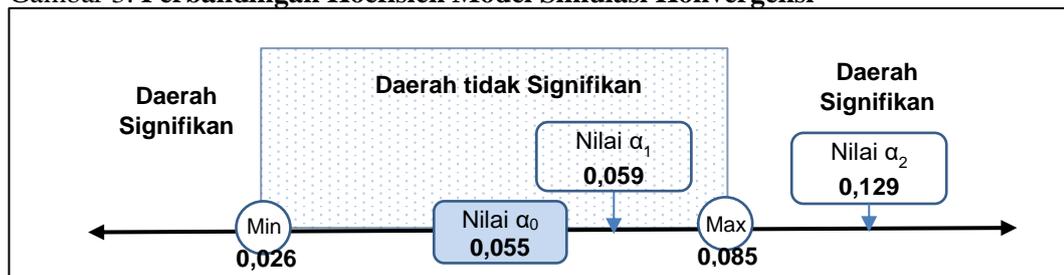
output produksi dan juga pengembangan produktivitas baik dari modal maupun dari tenaga kerja.

Selanjutnya, hubungan yang terjadi antara belanja modal dan pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki arah yang negatif namun tidak signifikan. Hubungan yang tidak signifikan dapat terjadi dikarenakan proporsi belanja modal terhadap total belanja memiliki nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kedua belanja lainnya. Selain itu, menurut weigner dalam (Johansson, 2016), pada tahap awal pembangunan, belanja modal/infrastruktur pemerintah cenderung akan menjadi beban pembangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh negatif antara belanja modal dengan tingkat pendapatan per kapita dapat disebabkan karena pada tahap awal pembangunan ekonomi, belanja modal/infrastruktur masih menjadi beban ekonomi yang belum mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan dalam jangka panjang hasil dari belanja modal yang dikeluarkan pemerintah akan memiliki kontribusi terhadap peningkatan fasilitas serta peningkatan aktivitas ekonomi.

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Konvergensi

Setelah diketahui koefisien konvergensi yang terjadi pada masing masing simulasi, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengukur tingkat signifikansi dari masing masing koefisien konvergensi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan interval signifikansi dari koefisien konvergensi absolut. Nilai koefisien konvergensi kondisional yang berada diluar nilai interval berarti memiliki pengaruh yang berbeda jika dibandingkan dengan simulasi I tanpa adanya perubahan kebijakan.

Gambar 3. Perbandingan Koefisien Model Simulasi Konvergensi



Sumber: hasil regresi, diolah

Hasil yang diperoleh melalui gambar 3 menunjukkan perbandingan nilai koefisien konvergensi absolut memberikan gambaran bahwa konvergensi yang terjadi dengan adanya faktor perubahan kebijakan fiskal kontraktif tidak memiliki perbedaan dibandingkan dengan tanpa adanya perubahan kebijakan. Sedangkan koefisien konvergensi kondisional dengan adanya perubahan kebijakan fiskal ekspansif memiliki pengaruh dalam mempercepat kondisi konvergensi yang terjadi.

E. KESIMPULAN

Fokus dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empirik peran pemerintah terhadap percepatan pemerataan pembangunan di Jawa Timur melalui pendekatan pendapatan per kapita serta kebijakan fiskal (struktur anggaran pemerintah daerah) di masing masing daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri atas 38 kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur dengan periode penelitian selama 5 tahun yaitu 2015-2019. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat tiga kesimpulan yang diperoleh. Pertama, Terjadi konvergensi di daerah Jawa Timur dengan kecepatan konvergensi 0,57% per tahun dan akan terjadi keseimbangan pendapatan perkapita selama kurang lebih 12 tahun tanpa adanya perubahan kebijakan. Kedua, kebijakan Fiskal Kontraktif (Peningkatan Pendapatan) tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya percepatan pemerataan pembangunan. Ketiga, kebijakan Fiskal

Ekspansif (Peningkatan Belanja) mempercepat terjadinya pemerataan pembangunan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita 0,21% per tahun. Dengan tingkat rata-rata pertumbuhan tersebut diperkirakan akan terjadi keseimbangan pendapatan perkapita dalam waktu kurang dari 5 tahun.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat tiga rekomendasi yang dapat disampaikan dalam rangka mempercepat terjadinya pemerataan pembangunan regional di Jawa Timur melalui kebijakan fiskal. Rekomendasi pertama adalah pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Timur dengan tetap memperhatikan kualitas belanja (*quality spending*). Rekomendasi berikutnya adalah belanja pemerintah perlu difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan publik sehingga dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian dan peningkatan pemerataan pembangunan regional di Jawa Timur. Selain rekomendasi dalam hal kebijakan, terdapat rekomendasi akademik yang ditujukan agar penelitian yang dilakukan selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik adalah dengan mempertajam analisis mengenai peran pemerintah terkait masalah pemerataan (*equity*) dalam rangka pengendalian pembangunan, penelitian selanjutnya perlu untuk memperhatikan juga pemerataan pembangunan yang berfokus pada ketimpangan individu sebagai unit analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R., & Wahyunadi. 2015. Disparitas dan konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan kota di provinsi nusa tenggara barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 13–23.
- Agus, Widarjono. 2015. *Analisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN
- Amalia, S. K., Santoso, D. B., & Sasongko, S. 2017. Convergence analysis of economic growth in east java. *Jejak*, 11(1), 151–161.
- Amri, K., Nazamuddin, Masbar, R., & Aimon, H. 2019. Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel data evidence from indonesia. *Regional Science Inquiry*.11(1)
- Armstrong, H., & Taylor, J. 2000. *Regional Economics and Policy*, 3rd Edition. Massachusetts, USA: Blackwell Publisher.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur 2015 - 2019. Jakarta.
- Barro, R. J., & Sala-I-Martin, X. 1992. Convergence. *Journal of Political Economy*, 223–251.
- Barro, R. J., & Sala-I-Martin, X. 2004. Economic growth. *In Economic and Political Weekly* (Second Edi, Vol. 43, Issue 2). The MIT Press.
- Barro, Robert J. 2015. Convergence and modernisation. *Economic Journal*, 125(585), 911–942.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Butkus, & Pukeliene. 2012. Regional convergence assessment in eu countries in the context of national economic development. *Ekonomika* 91 (2): 22
- Debnath, Avijit, and Niranjana Roy. 2012. “Testing Spillover Effects of Economic Growth : The Case of India ’ S Northeastern Region” XI (3): 84–92.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ekananda, M. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, *UI Press*, Jakarta.
- Fajri, A. 2016. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Gasparini, Leonardo & Nora Lustig. 2010. The rise and fall of income inequality in latin america. *Documento de Trabajo*. No. 118
- Gujarati, D.N., & Porter, D.C. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika* (edisi kelima). Jakarta: Salemba.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Heng, Y., & Hong, Z. 2012. A study of productive expenditure bias in county-level finance in china. *Social Sciences in Cina*, 33(1), 127–147.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economics Development* (Vol. 10). University of Texas: Yale University Press.
- Hyman, David N. 2010, *Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy* (10th edition). Mason: Pre-PressPMG.
- Imamy, Sumiyarti dan Akhmad Fauzan, 2005. Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok. *Media Ekonomi*, Vol. 11, No. 2.
- Iswanto, D. 2015. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di propinsi jawa timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 41–66.
- Johansson, Å. 2016. Public finance, economic growth and inequality: a survey of the evidence. *OECD Economics Department Working Paper* No. 1346.
- Kurniawan, A., Effendi, N., & Wardhana, A. (2010). Analisis alokasi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di jawa barat. 2006, 1–12.
- Li, W., & Sarte, P. D. 2004. Progressive taxation and long-run growth. *American Economic Review*, 94(5), 1705–1716.
- Luintel, K. B., Matthews, K., Minford, L., Valentinyi, A., & Wang, B. 2020. The role of provincial government spending composition in growth and convergence in china. *Economic Modelling*, 90.
- Mamesah, R., Walewangko, E., & Kawung, G. M. 2013. Analisis belanja modal dan belanja pegawai terhadap peningkatan ekonomi sektor jasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Mankiw, N.G. 2007. *Teori makroekonomi* (Edisi Ketujuh). Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nuraini, I. 2017. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, 79–93.
- Ojede, A., Atems, B., & Yamarik, S. 2018. The Direct and Indirect (Spillover) Effects of Productive Government Spending on State Economic Growth. *Growth and Change* Vol. 49, 122–141
- Olsson, O. 2013. Essentials of advanced macroeconomic theory. *Essentials of Advanced Macroeconomic Theory*, 1–176.
- Paas, T., Kuusk, A., Schlitte, F., & Vörk, A. 2006. Econometric Analysis of Income Convergence in Selected EU Countries and Their Nuts 3 Level Regions. *Tartu University Press*, Working Papers.

- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: pendekatan analisis jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228
- Solow, R. 1956. A Contribution to The Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics* Vol.70, (No.1) : 65–94.
- Syaiful, 2007. Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan. *Riset Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. M. 2019. Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kota tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–11.
- Taosisge, W., 2016. Konvergensi Disparitas Ekonomi antar Daerah di Indonesia.
- Todaro, M.P., & Stephen, C.S. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, J. 2007. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 1–21.
- Wibisono, Y. 2003. Konvergensi di Indonesia: Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol.51, (No.1), : 53-82.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Yaya, O. S., Furuoka, F., Pui, K. L., Jacob, R. I., & Ezeoke, C. M. (2020). Investigating Asian Regional Income Convergence using Fourier Unit Root test with Break. *International Economics*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 72. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2006. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.